

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
A. PENGUNGKIT	36.30				34.63			
I. PEMENUHAN	14.60				13.09			
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	2.00				2.00			
i. Tim Reformasi Birokrasi	0.40				0.40			
		a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	A/B/C	A	1.00		SK Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar No. 903/527/Sekr-2020 tanggal 11 Februari 2020	https://drive.google.com/file/d/1FDnAlpu1AYZPHgah3K8DQVfhrh9YLd/view?usp=sharing
		b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja	A/B/C/D	A	1.00		Notulen pembahasan PMPRB dan kesepakatan Asesor pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020	https://drive.google.com/file/d/1p0BNZT41t13oBfKINsUBkWhTeA-vAk9/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1u6pJGJSkyFsyDaRPS15ZXWxbC7dn6tCX/view?usp=sharing
		c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1.00		Notulen dalam rangka Monitoring dan evaluasi RB pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020	https://drive.google.com/file/d/1V3JmPGettQBHaEz5onWXtG6X0L_HOLAV/view?usp=sharing
		d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi						
ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0.40				0.40			
		a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1.00		Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Prov. Sumbar tahun 2016-2021	https://drive.google.com/file/d/1p0BNZT41t13oBfKINsUBkWhTeA-vAk9/view?usp=sharing
		b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	A/B/C/D	A	1.00		Notulen Sosialisasi RB pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020	https://drive.google.com/file/d/1_dT59cYo6G-K40xViqrY3akWN0a-2N/view?usp=sharing
		c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map	A/B/C	A	1.00		Renaksi RB 2020	https://drive.google.com/file/d/18FYvUjhw26h1Sakk4L-4er5VHgGhW3z6/view?usp=sharing
		d. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab						
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi	0.80				0.80			
		a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	A/B/C/D	A	1.00		SK KDK Nomor : 903/528/Sekr-2020 tanggal 11 Februari 2020 tentang Pembentukan tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	https://drive.google.com/file/d/1CBJR9DPw7KDDXgkpvNHjxwTLgpEAbNPQ/view?usp=sharing
		b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB						
		c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain						
		d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB						

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
	b.		Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB	a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	A	1.00	Notulen pembahasan PMPRB dan kesepakatan Asesor pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020	https://drive.google.com/file/d/1u6piGJSkyFsyDaRp5J5ZXWxbC7dn6tCX/view?usp=sharing
	c.		Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	A	1.00	Notulen dalam rangka Monitoring dan evaluasi RB pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020	https://drive.google.com/file/d/1V3JmPGettQBHaEz5onWxtG6X0L_HOLAV/view?usp=sharing
	d.		Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja	a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	A	1.00	Notulen dalam rangka Monitoring dan evaluasi RB pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020	https://drive.google.com/file/d/1V3JmPGettQBHaEz5onWxtG6X0L_HOLAV/view?usp=sharing
	iv. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja		0.40				0.40		
	a.		Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	A	1.00	Notulen Sosialisasi RB pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 dan catatan PMPRB	https://drive.google.com/file/d/1_dT59cYo6G-K40oXViqRy3akWN0a-2N/view?usp=sharing
	b.		Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	a. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i>	A/B/C/D	A	1.00	SK Kepala Dinas Kehutanan NO. 065/2977/Sekr-2019 Tanggal 16 Agustus 2019 tentang Agen Perubahan dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar	https://drive.google.com/file/d/15L4EiFDBHg86m7kIQgbCovuhMvy8tZ/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1Fliz2kBeER2FPdnglp4NwRDu6CynGLP9u/view?usp=sharing
	2 DEREGULASI KEBIJAKAN		1.00				1.00		
	- Harmonisasi		1.00				1.00		
	a.		Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A	1.00	Surat Kepala Dinas Kehutanan No.522/1833/Sekr-2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang usulan Perubahan Pergub No.54 Tahun 2017	https://drive.google.com/file/d/1M52Is0PiMxn1aF8F3vWhKOTDlouf8oFl/view?usp=sharing
	b.		Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A	1.00	Surat Kepala Dinas Kehutanan No.522/1390/Sekr-2019 tanggal 13 April 2019 dan no. 910/3652/Sekr-2018 tanggal 2 Oktober 2018	https://drive.google.com/file/d/1fMAv9VhxcujcpMlwuyOXlVFFVUxv5PX/view?usp=sharing
	3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		2.00				1.67		
	i. Evaluasi Kelembagaan		1.00				1.00		
	a.		Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	A/B/C	A	1.00	Nota Dinas No. 800/2797/Sekr-2019 tanggal 5 Agustus 2019 perihal pembaharuan data e-Formasi	https://drive.google.com/file/d/1_bhKNMEXGai6Lz3QkxjrINW5jwWCAfMR/view?usp=sharing

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	A/B/C	A	1.00		Permen LHK No. P.74/Menlhk/Setjen/kum.1/8/2016 tentang Pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan beserta penjelasan indikator urusan pemerintahan bidang kehutanan	https://drive.google.com/file/d/1yEp9rIzkPr42jgStoBjF1U05HKVKqB7-/view?usp=sharing
c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	A/B/C	A	1.00		Hasil Evaluasi Kemungkinan Duplikasi Fungsi (Pergub No. 065-838-2019 tentang Perubahan atas Keputusan Perub No. 065-889-2018 tentang Peta jabatan pada perangkat daerah di lingkup Prov. Sumbar)	https://drive.google.com/file/d/1DyDG7QmW2gqIBv9osUODoQvOa_LpRKC2/view?usp=sharing
d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	A/B/C	A	1.00		Telaah Staf terkait koordinasi antar Unit Kerja (Nota Dinas No.800/921/Sekr-2019 tanggal 8 Maret 2019 perihal permintaan instrumen pendukung pengukuran kinerja)	https://drive.google.com/file/d/1pR1AtctaiRnEvdihGjCT2lcG3Uv4qm/view?usp=sharing
e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya		a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja	A/B/C	A	1.00		Hasil Evaluasi kesesuaian Fungsi dengan SKP	https://drive.google.com/file/d/1A2e3ifCj5793A7qp33ekin8ir0Pdt0m/view?usp=sharing
f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya		a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya	A/B/C	A	1.00		Uraian Tugas masing-masing unit kerja/Pergub No.54 th 2017 ttg Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dishut Prov. Sumbar	https://drive.google.com/file/d/1z4D0PvheMm633aJtQC9eYdIUaLK6Y3C/view?usp=sharing
g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	A/B/C	A	1.00		Surat Kepala Dinas Kehutanan No.522/1833/Sekr-2019 tanggal 13 Mei 2019 tentang usulan Perubahan Pergub No.54 Tahun 2017	https://drive.google.com/file/d/1W8_zTjARMQBRVUGCyM65CF57f9l0g06h/view?usp=sharing
h. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan		a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat	A/B/C	A	1.00		Keputusan Gubernur No. 065-838-2019 ttg Perubahan atas Keputusan Gubernur Sumbar. No. 065-889-2018 tentang Peta Jabatan Pada Peangkat Daerah Lingkup Prov. Sumatera Barat	https://drive.google.com/file/d/1DyDG7QmW2gqIBv9osUODoQvOa_LpRKC2/view?usp=sharing
i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi	A/B/C	A	1.00		Pergub Nomor 108 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang perubahan Pergub 75 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Dishut Prov. Sumbar	https://drive.google.com/file/d/1HKW9drk9UeE-W1AmnvoyK8GEpDA1KEI5/view?usp=sharing
j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	A/B/C	A	1.00		Pergub Nomor 108 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang perubahan Pergub 75 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Dishut Prov. Sumbar	https://drive.google.com/file/d/1HKW9drk9UeE-W1AmnvoyK8GEpDA1KEI5/view?usp=sharing
ii. Tindak Lanjut Evaluasi	1.00				0.67			
a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1.00		Pergub Nomor 108 Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang perubahan Pergub 75 Tahun 2017 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah Dishut Prov. Sumbar	https://drive.google.com/file/d/1HKW9drk9UeE-W1AmnvoyK8GEpDA1KEI5/view?usp=sharing
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi		a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	C	0.33		Dinas Kehutanan sebagai SKPD sampel dalam penyederhanaan birokrasi Sumbar sebagaimana surat KDK ttg penyederhanaan birokrasi pada jabatan administrasi di lingkup pemprov (Srt No.800/4272/Sekre-2019 tanggal 25 Desember 2019) masih dalam proses penyederhanaan birokrasi	https://drive.google.com/file/d/1mrvhF3V8RrLDdnwpu1yfuBk1SRhHSSNm/view?usp=sharing
4 PENATAAN TATALAKSANA	1.00				1.00			
i. Proses bisnis dan prosedur operasional	0.50				0.50			
a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis		a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	A/B/C	A	1.00		Pedoman Mutu PM.02 Business Process Map dan telah direvisi	https://drive.google.com/file/d/1iXF1lbc3p2Wk9140lbZyLwV0hAH/view?usp=sharing

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
			b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	A	1.00		Revisi Business Process Map	https://drive.google.com/file/d/11XFzllbClki3pZWk9i40lbZyLwV0hAH/view?usp=sharing
			c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi		a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	A	1.00		Revisi Business Process Map	https://drive.google.com/file/d/11XFzllbClki3pZWk9i40lbZyLwV0hAH/view?usp=sharing
			d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang		a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	A	1.00		Revisi Business Process Map	https://drive.google.com/file/d/11XFzllbClki3pZWk9i40lbZyLwV0hAH/view?usp=sharing
			e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	A	1.00		Revisi Business Process Map	https://drive.google.com/file/d/11XFzllbClki3pZWk9i40lbZyLwV0hAH/view?usp=sharing
			f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	A	1.00		Standar Operasional Prosedur	https://drive.google.com/file/d/11Nw5EbG8p6TarDO80C2452WWdKXVAMP/view?usp=sharing
			g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan	A/B/C/D	A	1.00		Standar Operasional Prosedur	https://drive.google.com/file/d/11Nw5EbG8p6TarDO80C2452WWdKXVAMP/view?usp=sharing
			h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	A	1.00		Laporan Evaluasi SOP Administrasi pemerintah pada dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	https://drive.google.com/file/d/11XFzllbClki3pZWk9i40lbZyLwV0hAH/view?usp=sharing
			i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	A	1.00		Penyesuaian/perubahan Peta Proses Bisnis	https://drive.google.com/file/d/11XFzllbClki3pZWk9i40lbZyLwV0hAH/view?usp=sharing
ii. Keterbukaan Informasi Publik				0.50				0.50			

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik		Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1.00		Screen shoot Website Dinas Kehutanan Prov. Sumbar (url:http://dishut.sumbarprov.go.id) dan Daftar Informasi Publik (DIP dan daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Kehutanan Prov.Sumbar	https://drive.google.com/file/d/13qewsNAah8K1m2asHE1kX4trXH5KbSV1/view?usp=sharing
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	A	1.00		Screen shoot Website Dinas Kehutanan Prov. Sumbar (url:http://dishut.sumbarprov.go.id) dan Daftar Informasi Publik (DIP dan daftar Informasi yang Dikecualikan Dinas Kehutanan Prov.Sumbar	https://drive.google.com/file/d/13qewsNAah8K1m2asHE1kX4trXH5KbSV1/view?usp=sharing
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.40					1.27		
i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai	0.20					0.20		
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja		a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	1.00		Dokumen Analisis Beban Kerja	https://drive.google.com/file/d/1GZmeQLPIWw4ZBaU7s0_XRwXHb-7vZvEv/view?usp=sharing
b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C	A	1.00		Dokumen Analisis jabatan dan Beban Kerja	https://drive.google.com/file/d/1GZmeQLPIWw4ZBaU7s0_XRwXHb-7vZvEv/view?usp=sharing
c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama		a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D	A	1.00		Dokumen Analisis jabatan dan Beban Kerja	https://drive.google.com/file/d/1GZmeQLPIWw4ZBaU7s0_XRwXHb-7vZvEv/view?usp=sharing
ii. Pengembangan Pegawai Berbasis	0.20					0.07		
a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	C	0.33		Rekapitulasi Rencana Diklat pada Balai Diklat LHK Pematangsiantar	https://drive.google.com/file/d/1yijUkvWj0e0M03kistH4iFRNT83555/view?usp=sharing
b. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	C	0.33		Data PNS Yang mengikuti Diklat ke Kementerian/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar TA 2018/2019	https://drive.google.com/file/d/1XIF7p-t3FmpFwtaE0whRm41KYM-ySym8/view?usp=sharing
iii. Penetapan Kinerja Individu	0.40					0.40		
a. Penerapan Penetapan kinerja individu		a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu	A/B/C/D	A	1.00		Contoh PK dan SKP individu	https://drive.google.com/file/d/14tmeJDXkMSGTSMgJcWl_sn_Li_7AaMDn/view?usp=sharing
b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1.00		Realisasi PK dan SKP individu	https://drive.google.com/file/d/14tmeJDXkMSGTSMgJcWl_sn_Li_7AaMDn/view?usp=sharing
c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	A	1.00		Contoh SKP atasan dengan bawahannya (Seksi PDAS)	https://drive.google.com/file/d/1XxtKklbLWkgUtiPVv2etXtGj2V1qUN9w/view?usp=sharing
d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1.00		Instrumen pengukuran kinerja/Laporan Harian An. Ninin Asriani bulan Maret 2020	https://drive.google.com/file/d/1EqdrUASyUrxeyfw7FL5TR8vTgEhW121/view?usp=sharing

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	A	1.00		Daftar rekapitulasi pengukuran kinerja dan besarnya tambahan penghasilan	https://drive.google.com/file/d/1mR61EuKrovgQ_hPWt9_ruWa-QoJGQmgc/view?usp=sharing
f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya		a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya	A/B/C/D	A	1.00		Hukuman disiplin An. Achirul berdasarkan Keputusan Kepala UPTD KPHL Solok Nomor 800/30/UPTD.KPHL.Sik-2020 tanggal 14 Januari 2020	https://drive.google.com/file/d/1QOkPK0kPyf7oZkPof12bqMs2x8PMixh5/view?usp=sharing
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode	0.20					0.20		
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan	A/B/C/D	A	1.00		Kode Etik Aparatur Sipil Negara Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana SK KDK No.800/514/Sekr-2019 tanggal 7 Februari 2019	https://drive.google.com/file/d/1EMXGMCPtBfwDFN0-wzeuMRc4e-vPrdb/view?usp=sharing
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	A/B/C	A	1.00		Proses pelaksanaan aturan disiplin terhadap Staf UPTD KPHL Solok (An. Achirul)	https://drive.google.com/file/d/1zTMWCz1UT9-tQBhCt47KWERMh1ZVE/view?usp=sharing
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0.20					0.20		
a. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi	A/B/C/D	A	1.00		Dokumen Anjab/ABK	https://drive.google.com/file/d/1oMSDDngUd8og7LWb8KnfYUkuwaRibT2X/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1GZmeQLPIWw4ZBaU7s0_XRwXHb-7vZvEv/view?usp=sharing
b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	A	1.00		Hasil Evaluasi Jabatan Fungsional	https://drive.google.com/file/d/1jvdJcfQv7luPXgr_GnniFSFOZV9sdU_p/view?usp=sharing
vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0.20					0.20		
- Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai		Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya/Tidak	Ya	1.00		Screenshot Simpeg	https://drive.google.com/file/d/12xAVD1PROPSUL3POzHzzlQUnfu5PqYOd/view?usp=sharing

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50				2.50			
	i. Keterlibatan pimpinan	1.00				1.00			
	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	A/B/C/D	A	1.00		Rapat Review RENSTRA Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (dipimpin oleh Kepala dinas Kehutanan), Jum'at, 10 Februari 2017	https://drive.google.com/file/d/1JEEdYfgR858x4kzrWzZOBV-XXyJNtTME/view?usp=sharing
	b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1.00		Notulen Penetapan perjanjian Kinerja, Senin tanggal 10 Februari 2020, (dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan)	https://drive.google.com/file/d/1CmtAJ8G2ykf5PhBzp4P7a6_6xhJUblF/view?usp=sharing
	c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala	A/B/C/D	A	1.00		Notulen capaian perjanjian kinerja TW I (dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan)	https://drive.google.com/file/d/1CmtAJ8G2ykf5PhBzp4P7a6_6xhJUblF/view?usp=sharing
	d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada	A/B/C/D	A	1.00		Tabel VI.1 pada Renstra (Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dishut Prov. Sumbar) yang merupakan turunan dari RPJMD Sumatera Barat Tahun 2016-2021	https://drive.google.com/file/d/14I9WUjN0mUUs8BSYR-RUwKHVHau-8S3/view?usp=sharing
	e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun		a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada	A/B/C/D	A	1.00		Perjanjian Kinerja Esselon II dan Renaksi	https://drive.google.com/file/d/1cwT1b3kivxgHdWHt2_vONiibBlgrEf64/view?usp=sharing
	f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja	A/B/C/D	A	1.00		Notulen capaian perjanjian kinerja TW I (dipimpin oleh Kepala Dinas Kehutanan)	https://drive.google.com/file/d/1GyYB3_YRsEtVXk_3yGfhdI2WQwrrRU9j/view?usp=sharing
	ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1.50				1.50			
	a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1.00		Undangan dan Srt Penugasan ASN mengikuti peningkatan AKIP OPD	https://drive.google.com/file/d/1XPDdMJvFMEdYF6fdpt_xpE5a67z4/view?usp=sharing
	b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1.00		Screenshot E Sakip/ LKJ Dinas Kehutanan Tahun 2019	https://drive.google.com/file/d/1xH5nLgKXzaSGyHoZydyV9wNNRrHQKQu6/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/1QHOYF842h0e5Xka0uxpONnrWGY7MuPtE/view?usp=sharing

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.20				1.30			
	i. Gratifikasi	0.30				0.08			
	a. Telah dilakukan <i>public campaign</i>		a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	A	1.00		Foto pembacaan kode etik oleh Kepala Dinas Kehutanan Prov. Sumbar	https://drive.google.com/file/d/1gMstnaelbEuzqF_Z10AqzOjs3Ntm9ki/view?usp=sharing
	b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0.00	-		
	c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0.00	-		
	d. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Tidak	0.00	-		
	ii. Penerapan SPIP	0.30				0.30			
	a. Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian		a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian	A/B/C	A	1.00		SK Kepala Dinas Kehutanan No. 903/923/Sekr-2020 tanggal 16 Maret 2020/ RTP Dishut 2020	https://drive.google.com/file/d/1Fk_JvDn_ZZp_hQH_uBH1cnFyS7-GMuy7V/view?usp=sharing
	b. Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja		a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D	A	1.00		Rencana Tindak Pengendalian	https://drive.google.com/file/d/1iH4L2khE4Mdnq8f6dcEMi2mYGVhGt9TP/view?usp=sharing
	c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan	A/B/C/D	A	1.00		Rencana Tindak Pengendalian	https://drive.google.com/file/d/1iH4L2khE4Mdnq8f6dcEMi2mYGVhGt9TP/view?usp=sharing
	d. Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	A	1.00		Undangan Sosialisasi SPP dan Notulen	https://drive.google.com/file/d/11mm3R19VbK_K1QazKoQj7VEpa_nGFKnM/view?usp=sharing
	e. Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern		a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	A	1.00		Rencana Tindak pengendalian SPIP	https://drive.google.com/file/d/1iH4L2khE4Mdnq8f6dcEMi2mYGVhGt9TP/view?usp=sharing
	f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI		a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	A/B/C/D	A	1.00		Hasil Evaluasi Rencana Tindak pengendalian SPIP	https://drive.google.com/file/d/1b_xT4Mja2GAo5I_PvQTjCOxhUHFwhUB/view?usp=sharing
	iii. Pengaduan Masyarakat	0.50				0.50			
	a. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1.00		Telaah Staf Kabid Perlindungan dan KSDAE, Februari 2019 dan hasil interogasi antara Dr. Ferdinal asmin dan Yusuf Nur, Didiaman Purba	https://drive.google.com/file/d/1F20Yjo_U8ETXUnjzRNK2_WEMqciI_mcl/view?usp=sharing
	b. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1.00		Hasil interogasi antara Dr. Ferdinal asmin dan Yusuf Nur, Didiaman Purba	https://drive.google.com/file/d/1F20Yjo_U8ETXUnjzRNK2_WEMqciI_mcl/view?usp=sharing
	c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Ya	1.00		Hasil interogasi antara Dr. Ferdinal asmin dan Yusuf Nur, Didiaman Purba	https://drive.google.com/file/d/1F20Yjo_U8ETXUnjzRNK2_WEMqciI_mcl/view?usp=sharing
	iv. Whistle Blowing System	0.30				0.10			
	- <i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan		a. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke seluruh pegawai b. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. <i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. <i>Whistle blowing system</i> belum disosialisasikan	A/B/C/D	C	0.33			
	v. Penanganan Benturan Kepentingan	0.30				0.16			
	a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	D	0.00			
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1.00		Mobil Dinas di gunakan hanya untuk tugas/operasional kantor. (foto garasi mobil)	https://drive.google.com/file/d/1vVMCs06T0jv3q_xvQS7rB8KgtcVSHrP/view?usp=sharing

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
	c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	B	0.50		Kurangnya tempat penyimpanan kendaraan dinas, maka dilakukan pembangunan garasi pada tahun 2018-2019.	https://drive.google.com/file/d/11mm3R19VBk_K1QazKo0j7VEpa_nGfKnM/view?usp=sharing
	d. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan	A/B/C/D	B	0.67		Pembangunan garasi	https://drive.google.com/file/d/11mm3R19VBk_K1QazKo0j7VEpa_nGfKnM/view?usp=sharing
	vi. Pembangunan Zona Integritas	0.50				0.17			
	a. Telah dilakukan pencanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja		Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Ya	1.00		Dokumen Penandatanganan Integritas	https://drive.google.com/file/d/1QmcDVH0EKue8m6YXz3QaFlBaeYrv1O/view?usp=sharing
	b. Telah dilakukan pembangunan zona integritas		a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas	A/B/C	C	0.00		-	
	c. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas		a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi	A/B/C	C	0.00		-	
	8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2.50				2.36			
	i. Standar Pelayanan	0.40				0.40			
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1.00		SK KDK No. 120/2083/Sekr-2013 tentang Standar pelayanan pada jenis Pelayanan Dilingkungan Dishut Prov. Sumbar	https://drive.google.com/file/d/1LpElruFBDLgSmTRMQ0reGXV6RRvB-G/view?usp=sharing
	b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	1.00		Foto papan maklumat pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat	https://drive.google.com/file/d/1uVqsKvk5-DNOZwMuAP5d2T0znkD6mH4/view?usp=sharing

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademis, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	1.00		Surat Kepala Dinas Kehutanan No 522.1/1488/PP-PH-2019 Tanggal 23 April 2019 beserta Lampirannya	https://drive.google.com/file/d/1nP-by1-ppHg4bJtNcXGM6jP1_Qa1rQu/view?usp=sharing
ii. Budaya Pelayanan Prima	0.40					0.36		
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	A	1.00		Sertification of Management Systems ISO 9001:2015	https://drive.google.com/file/d/1NsECz0XeiWwE1m7XPdV6uw7kcYc4u0/view?usp=sharing
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online , hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	A	1.00		Screen shoot Website Dinas Kehutanan Prov. Sumbar (url:http://dishut.sumbarprov.go.id) - Permohonan Permintaan Bibit Online , Form Permintaan Bibit	https://drive.google.com/file/d/1aST0hOg1pxc9bxgrMAzvkvqyCNSfc-/view?usp=sharing
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	B	0.67		Hasil survey kepuasan pelanggan	https://drive.google.com/file/d/1yIPRee2C3f08rv7ehN017KD1rBe1rn9/view?usp=sharing
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	1.00		Piagam Penghargaan atas capaian kinerja TA 2019 kepada UPTD KPHL Sijunjung Nomor 903/445/Sekr-2020 tanggal 5 Februari 2020	https://drive.google.com/file/d/15JHn-UGTVI_Exy0BG2kzg4mxxm-TZl6E/view?usp=sharing
e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras d. Apabila pelayanan belum terpadu	A/B/C/D	A	1.00		Surat Kepala DMP dan PTSP Nomor 570/555-Periz/DPM & PTSP/VI/2019 tanggal 18 Juni 2019	https://drive.google.com/file/d/1wnhDRywQtnU47SIMEaHbbUqtH3VJaww/view?usp=sharing

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
f. Telah terdapat inovasi pelayanan		a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain d. Belum terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	B	0.67		Inovasi pelayanan (screenshot inovasi pd Dinas Kehutanan)	https://drive.google.com/file/d/1YIU91sOuGIZ45V582djAXliiOTDxbAGN/view?usp=sharing
iii. Pengelolaan Pengaduan	0.60				0.60			
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan		a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	A	1.00		SPAN LAPOR (Penanganan Pengaduan)	https://drive.google.com/file/d/1p0gQnziQegUhd-tu6RNDwOH4x8Cavz/view?usp=sharing
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C/D	A	1.00		SPAN LAPOR (Penanganan Pengaduan)	https://drive.google.com/file/d/1p0gQnziQegUhd-tu6RNDwOH4x8Cavz/view?usp=sharing
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan	A/B/C/D	A	1.00		Telaah Staf Kabid Perlindungan dan KSDAE, Februari 2019 dan hasil interogasi antara Dr. Ferdinal asmin dan Yusuf Nur, Didiaman Purba	https://drive.google.com/file/d/1iw5kd3K2Ycl-8YRDJS3148MuEA0FclU9/view?usp=sharing
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	A	1.00		Telaah Staf Kabid Perlindungan dan KSDAE, Februari 2019 dan hasil interogasi antara Dr. Ferdinal asmin dan Yusuf Nur, Didiaman Purba	https://drive.google.com/file/d/1iw5kd3K2Ycl-8YRDJS3148MuEA0FclU9/view?usp=sharing
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0.70				0.70			
a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	A	1.00		Hasil survey kepuasan pelanggan	https://drive.google.com/file/d/1y1PRee2C3f0BrV7ehn017KD1rBe1rn9/view?usp=sharing
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara <i>online</i> (<i>website</i> , media sosial, dll) dan <i>offline</i> b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara <i>offline</i> di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	1.00		Screenshot SPAN LAPOR	https://drive.google.com/file/d/1ykhTaiXzoAMyM WKX-aLEhb14qvDMXlzO/view?usp=sharing
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1.00		Hasil tinjauan manajemen survey kepuasan masyarakat	https://drive.google.com/file/d/1xM1f_w7nEdMIz9fs6d9Vr2tOIVQEtS8/view?usp=sharing
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.40				0.30			
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	1.00		Screen shoot Website Dinas Kehutanan Prov. Sumbang (url:http://dishut.sumbangprov.go.id) - Permohonan Permintaan Bibit Online , Form Permintaan Bibit	https://drive.google.com/file/d/1aST0hOg1pxc9bXgrMAanzjvqlyCNSfc-/view?usp=sharing
II.		b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	A/B/C	B	0.50		Penggunaan google form untuk SKM yang dulunya SKM dilakukan menggunakan kertas manual	
REFORM	21.70				21.54			
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00				3.00			
i. Komitmen dalam Perubahan	1.50				1.50			
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi		1 Agen 1 Perubahan	%	100.00%	1.00			

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
- Jumlah Agen Perubahan			Jumlah	1.00			KABARIMBO, SKM ONLINE, ABSEN ONLINE, EVALUASI WFH	https://drive.google.com/file/d/1_d_u7iBW034wL0g61zttMGD29I-wDJ6/view?usp=sharing
- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	4.00			KABARIMBO, SKM ONLINE, ABSEN ONLINE, EVALUASI WFH	https://drive.google.com/file/d/1_d_u7iBW034wL0g61zttMGD29I-wDJ6/view?usp=sharing
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	%	100.00%	1.00			
- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	4.00			KABARIMBO, SKM ONLINE, ABSEN ONLINE, EVALUASI WFH	https://drive.google.com/file/d/1_d_u7iBW034wL0g61zttMGD29I-wDJ6/view?usp=sharing
- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen			Jumlah	4.00			KABARIMBO, SKM ONLINE, ABSEN ONLINE, EVALUASI WFH	https://drive.google.com/file/d/1_d_u7iBW034wL0g61zttMGD29I-wDJ6/view?usp=sharing
ii. Komitmen Pimpinan	1.00					1.00		
- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	A	1.00		Rekap DPA dan target capaian IKU	https://drive.google.com/file/d/1MlgKefNE3nBR42ERUK2hV32KwVv2e8/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/17NmwbB9yp6TIdMuk_4w93a8guc_nAnm/view?usp=sharing
iii. Membangun Budaya Kerja	0.50					0.50		
- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	A	1.00		Kode Etik dan Motto pelayanan	https://drive.google.com/file/d/13rrBgwOyo8yFW9mCwk9THdI0madWx12/view?usp=sharing
2. DEREGULASI KEBIJAKAN	2.00					2.00		
- Peran Kebijakan	2.00					2.00		
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya		a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya	A/B/C	A	1.00		Nota Dinas KDK No. 360/1126/Sekr-2020 tanggal 21 April 2020 perihal Sistm Kerja Pemberlakuan PSBB di Lingkungan Dinas Kehutanan Prov. Sumbar sesuai dengan SE Gubernur No. 360/072/Covid-19-SBR/IV-2020 tanggal 21 April 2020	https://drive.google.com/file/d/1uyalEWz32dwxohNA_EofT_KGqDW6rxPI/view?usp=sharing
b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja		Persentase diperoleh dari jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit	%	100.00%	1.00			

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit			Jumlah	6.00			Pelayanan pada Proses Bisnis	https://drive.google.com/file/d/1FTMGCPdogcC8r5IsgYiQHciXm6bsok6Q/view?usp=sharing
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi			Jumlah	6.00			Pelayanan pada Proses Bisnis	https://drive.google.com/file/d/1FTMGCPdogcC8r5IsgYiQHciXm6bsok6Q/view?usp=sharing
			3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1.50				1.50			
			- Organisasi Berbasis Kinerja	1.50				1.50			
			- Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.		a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan c. Belum ada usulan	A/B/C	A	1.00		Proses Bisnis sesuai IKU	https://drive.google.com/file/d/1hBTDItelaoU_BgdRQZiSi1mZ_IsCyc6/view?usp=sharing
			4 PENATAAN TATALAKSANA	3.75				3.59			
			i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi	0.50				0.34			
			- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan		a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	B	0.67		Proses Bisnis sesuai IKU	https://drive.google.com/file/d/1hBTDItelaoU_BgdRQZiSi1mZ_IsCyc6/view?usp=sharing
			ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.25				1.25			
			a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1.00		I Governen (SIPKD, SPJ Online, SIMAYA, SIMBANGDA)	https://drive.google.com/file/d/18vybWkz9jXoAxzR4hMoaBKUbDoI4AxO3/view?usp=sharing
			b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1.00		Perjalanan Dinas eselon II sudah melalui SPBE	https://drive.google.com/file/d/18vybWkz9jXoAxzR4hMoaBKUbDoI4AxO3/view?usp=sharing
			iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai	2.00				2.00			
			a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	A	1.00		I Governen (SIPKD, SPJ Online, SIMAYA, SIMBANGDA)	https://drive.google.com/file/d/18vybWkz9jXoAxzR4hMoaBKUbDoI4AxO3/view?usp=sharing

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
- Jumlah program			Jumlah	12.00				https://drive.google.com/file/d/1wdUk6PYLe2Bj3pAew15z5jKroopnP0TO/view?usp=sharing
- Jumlah kegiatan			Jumlah	115.00			Jumlah kegiatan sesuai DPA awal sebanyak 135 kegiatan dan setelah rasionalisasi menjadi 115 kegiatan	https://drive.google.com/file/d/1wdUk6PYLe2Bj3pAew15z5jKroopnP0TO/view?usp=sharing
- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih						
- Jumlah program			Jumlah	12.00				https://drive.google.com/file/d/1wdUk6PYLe2Bj3pAew15z5jKroopnP0TO/view?usp=sharing
- Jumlah kegiatan			Jumlah	115.00			Jumlah kegiatan sesuai DPA awal sebanyak 135 kegiatan dan setelah rasionalisasi menjadi 115 kegiatan	https://drive.google.com/file/d/1wdUk6PYLe2Bj3pAew15z5jKroopnP0TO/view?usp=sharing
- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100.00%	1.00		Perjanjian Kinerja (Capaian Kinerja Dishut 2019 dari 4 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja)	https://drive.google.com/file/d/1s8Felic_LQxVgN8RuxprdN6THFyn0h40/view?usp=sharing
- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	5.00			Perjanjian Kinerja (Capaian Kinerja Dishut 2019 dari 4 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja)	https://drive.google.com/file/d/1s8Felic_LQxVgN8RuxprdN6THFyn0h40/view?usp=sharing
- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	5.00			Perjanjian Kinerja (Capaian Kinerja Dishut 2019 dari 4 sasaran strategis dan 5 indikator kinerja)	https://drive.google.com/file/d/1s8Felic_LQxVgN8RuxprdN6THFyn0h40/view?usp=sharing
- Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total	%	100.00%	1.00		IKU	https://drive.google.com/file/d/1vnHXyqtdalO9ny1MceHx0r-o7T171V/view?usp=sharing
- Jumlah Anggaran Total			Rupiah	16,343,683,075			DPA (Rekap DPA setelah rasionalisasi) dan Jumlah pagu di SIMBANGDA	https://drive.google.com/file/d/1wdUk6PYLe2Bj3pAew15z5jKroopnP0TO/view?usp=sharing
- Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing			Rupiah	16,343,683,075			DPA (Rekap DPA setelah rasionalisasi) dan Jumlah pagu di SIMBANGDA	https://drive.google.com/file/d/1wdUk6PYLe2Bj3pAew15z5jKroopnP0TO/view?usp=sharing
								https://drive.google.com/file/d/1EibBgK91oN2vGrQuS472YG3ZQmcyAtki/view?usp=sharing
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja	1.00					1.00		
- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi penganggaran b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektifitas dan efisiensi penganggaran c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring kinerja d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja	A/B/C/D	A		1.00	Sceenshoot SIPKD dan SAKATO Plan	https://drive.google.com/file/d/1JACU0BFpmpTgmpDX7IO5SfwhWdC-XK/view?usp=sharing
								https://drive.google.com/file/d/1tDWzSCN70i0ntPgfgoH2Xmqagstktu/view?usp=sharing
iii. Pemberian Reward and Punishment	1.00					1.00		
- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment oleh unit kerja		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment ; b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment ; c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment ; d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment .	A/B/C/D	A		1.00	Reward dan panisme Monev	https://drive.google.com/file/d/1Yj5h5H5skHJLzRoJ49ZcLlnqYeLU6r/view?usp=sharing
iv. Kerangka Logis Kinerja	0.75					0.75		
- Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai		a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada.	A/B/C/D	A		1.00	Peta Proses bisnis	https://drive.google.com/file/d/1VaAqET3TRmji0mAO1w-S_Kb-2hEXtuE/view?usp=sharing

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Data Pendukung
7 PENGUATAN PENGAWASAN	1.95				1.95			
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	0.75				0.75			
- Persentase penyampaian LHKPN		Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. 5E/03/M.PAN/01/2005	%	100.00%	1.00		Berita Acara Verifikasi LHKPN	https://drive.google.com/file/d/1_q_izF5mxMuzTbZgvn0CRG8nEMYLUG9T/view?usp=sharing
-Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	200.00				
- Eselon I/II			Jumlah	100.00				
- Lainnya			Jumlah	100.00				
-Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	200.00				
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	0.60				0.60			
- Persentase penyampaian LHKASN		Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	%	100.00%	1.00		Berita Acara Verifikasi LHKPN	https://drive.google.com/file/d/1_q_izF5mxMuzTbZgvn0CRG8nEMYLUG9T/view?usp=sharing
-Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			Jumlah	160.00				
-Jumlah Eselon III			Jumlah	20.00				
-Jumlah Eselon IV			Jumlah	40.00				
-Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	100.00				
-Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	100.00				
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat	0.60				0.60			
- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100.00%	1.00			
-Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah	1.00			Telaah Staf Kabid Perlindungan dan KSDAE, Februari 2019 dan hasil interogasi antara Dr. Ferdinal asmin dan Yusuf Nur, Didiaman Purba	https://drive.google.com/file/d/1675PbiYfGba3SV4xvN10rYCZbg1068r/view?usp=sharing
-Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah	0.00				
-Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah	1.00			Telaah Staf Kabid Perlindungan dan KSDAE, Februari 2019 dan hasil interogasi antara Dr. Ferdinal asmin dan Yusuf Nur, Didiaman Purba	https://drive.google.com/file/d/1675PbiYfGba3SV4xvN10rYCZbg1068r/view?usp=sharing
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3.75				3.75			
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50				2.50			
a.		a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	1.00		Inovasi PINSICA	https://drive.google.com/file/d/16zM6ZiAPgijZbsj9l82cAdX32qKgZ8Gw/view?usp=sharing
b.		Persentase diperoleh dari Jumlah perjanjian/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perjanjian/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100.00%	1.00			
-Jumlah perjanjian/pelayanan yang terdata/terdaftar			Jumlah	3.00				
-Jumlah perjanjian/pelayanan yang telah dipermudah			Jumlah	3.00			Inovasi DISHUT (PHBM, PERHUBAN, PINSICA)	https://drive.google.com/file/d/1AnPipb-tD08Q3ynwbXl70l8L_vMvh5iF/view?usp=sharing
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan	1.25				1.25			
- Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	A	1.00		SPAN LAPOR (Penanganan Pengaduan)	https://drive.google.com/file/d/1r7GCN6FQs-SsotcplkvG8Aew61wFIRkz/view?usp=sharing